



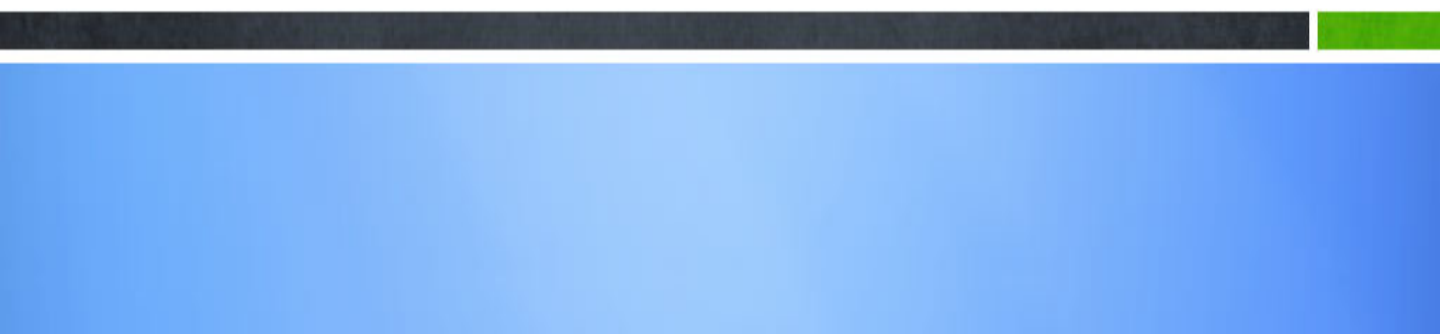
LAPORAN AKHIR TAHUN
**PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DATA**

Laporan Forum Masyarakat Statistik
Tahun 2011

Forum Masyarakat Statistik (FMS) bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan Pusat Statistik (BPS).



<http://www.bps.go.id>





LAPORAN AKHIR TAHUN
**PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DATA**

Laporan Forum Masyarakat Statistik
Tahun 2011



LAPORAN AKHIR TAHUN**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA**

(Laporan Forum Masyarakat Statistik Tahun 2011)

Katalog BPS : 1202034

No. Publikasi : 07310.459g

Ukuran Buku : A4

Naskah :

Forum Masyarakat Statistik

Gambar Kulit :

Subdirektorat Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:

Forum Masyarakat Statistik

Dicetak Oleh :

CV Rioma



Kata Sambutan

Ketua Forum Masyarakat Statistik

Kepengurusan Forum Masyarakat Statistik (FMS) masa kerja tahun 2011-2014 telah dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 5/M.PPN/01/2011 Tanggal 21 Januari 2011 tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2011-2014. Keberadaan FMS sebagai wadah yang bersifat nonstruktural dan independen diharapkan dapat berperan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh BPS melalui berbagai kegiatan yang direncanakan. Laporan ini menyampaikan berbagai kegiatan FMS sepanjang tahun 2011, termasuk tantangan yang dihadapi serta usulan pemecahannya.

Secara ringkas, dapat dilaporkan beberapa butir kesepakatan kegiatan FMS selama tahun 2011 antara lain program kerja FMS tahun 2011-2014, program kerja FMS tahun 2011, penetapan logo FMS, pembentukan kesekretariatan untuk mendukung kegiatan FMS, serta pembahasan dan diskusi terkait isu kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Capaian dan realisasi kegiatan FMS tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik selama tahun 2011 sebagai akibat dari beberapa kendala. Uraian lengkap kegiatan FMS Tahun 2011 dan kendalanya disajikan dalam "Laporan Tahunan 2011 Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014".

Kami percaya banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam upaya memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan FMS sejalan dengan rencana untuk meningkatkan kualitas perstatistikan di Indonesia. Penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dan dapat dipercaya menjadi suatu persyaratan mutlak pada era keterbukaan dan demokrasi sekarang ini. Bahkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus meningkat menuntut tersedianya data dan informasi statistik yang makin beragam dan semakin kompleks bagi perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program pembangunan. Selain itu, dunia usaha, para pengamat, akademisi, dan masyarakat umum juga sangat membutuhkan data dan informasi statistik. Baik dalam menunjang kegiatan mereka maupun dalam membantu memahami berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional.

Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas yang telah memberikan kepercayaan kepada anggota FMS terpilih masa kerja tahun 2011-2014 sekaligus memberikan berbagai dukungan baik administratif,



pembiayaan berbagai kegiatan, maupun fasilitas pendukung lain. Penyiapan fasilitas fisik kesekretariatan FMS sangat membantu penyiapan kegiatan FMS yang lokasinya disepakati di Kedeputian Ekonomi Bappenas/Kementerian PPN, Jalan Taman Suropati No. 2, Gedung Madiun Lantai 5 Jakarta 10310, Telp. atau Fax. (021) 31934259. Demikian pula penunjukan beberapa orang sekretariat pendukung FMS yang mewakili Kementerian PPN/Bappenas dan BPS RI dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi dan pembiayaan kegiatan FMS.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala BPS RI yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan FMS. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua anggota FMS yang memberikan sumbangan waktu, energi, dan pemikiran dalam upaya mendukung program kerja FMS tahun 2011-2014. Semoga capaian kegiatan FMS tahun 2011 ini dapat kita tingkatkan terus pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Desember 2012

Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja 2011-2014

Ketua,



Dr. Sudarno Sumarto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. FORUM MASYARAKAT STATISTIK (FMS)	3
BAB III. PROGRAM KERJA FORUM MASYARAKAT STATISTIK	9
BAB IV. PERMASALAHAN STATISTIK DAN REKOMENDASI	
FORUM MASYARAKAT STATISTIK TAHUN 2011	13
BAB V. PENUTUP	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	29
1. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: PER.006/M.PPN/10/2007	
2. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: KEP.5/M.PPN/01/2011	
3. Keputusan Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas Nomor: KEP.85/SES/HK/10/2011	
4. Bahan presentasi tentang “Metode Pengukuran Kemiskinan di Indonesia: Relevansi dan Keterbandingan”	
5. Bahan presentasi tentang “Statistik Ketenagakerjaan”	
6. Bahan presentasi tentang “Analisis Ketimpangan Pendapatan: Sektoral dan Spasial”	



<http://www.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

Pada era keterbukaan dan demokrasi sekarang, semua informasi yang terkait dengan kepentingan publik tidak bisa lagi didasarkan pada asumsi, anekdot, dan apalagi mitos. Semua informasi tersebut memerlukan *evidence base* yang akurat, relevan, berkesinambungan, mudah dimengerti dan secara terbuka siap pula diuji kebenarannya. Dalam konteks ini, data dan informasi statistik memegang peranan yang sangat penting.

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus meningkat pada gilirannya memerlukan data dan informasi statistik yang beragam, mutakhir, berkualitas, lengkap dan cepat. Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga legislatif sangat memerlukan data dan informasi statistik yang andal sebagai rujukan dan dasar pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan, strategi dan program pembangunan. Juga sebagai alat untuk mengoreksi kebijakan, memonitor dan mengevaluasi, mengklarifikasi, melegitimasi, dan bahkan memperdebatkan suatu kinerja pembangunan secara transparan. Selain itu, dunia usaha, para pengamat, akademisi, dan masyarakat umum juga sangat membutuhkan data dan informasi statistik. Baik dalam menunjang kegiatan mereka maupun dalam membantu memahami berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal itu, kesinambungan dan kualitas pembangunan nasional mensyaratkan adanya data dan informasi statistik yang tepat waktu dan berkualitas, baik sebagai input perencanaan kebijakan maupun sebagai output indikator hasil-hasil pembangunan. Peningkatan kualitas data statistik perlu mendapat perhatian semua pihak, baik dari BPS sebagai lembaga negara penyedia data statistik berkualitas, maupun dari pemerintah dan masyarakat pengguna data. Ketersediaan data statistik yang terpercaya dan berkualitas perlu didukung oleh peningkatan pelayanan statistik dan pemanfaatan statistik secara optimal melalui diseminasi data secara lebih efektif.

Upaya untuk mendukung terlaksananya tujuan tersebut antara lain telah diupayakan pemerintah melalui pembentukan Forum Masyarakat Statistik (FMS). Dasar hukum pembentukan FMS adalah Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan



Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 006/M.PPN/10/2007 (30 Oktober 2007) tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik. Berdasarkan peraturan ini, secara singkat FMS merupakan wadah nonstruktural dan independen yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat. Fungsi dan peran FMS adalah memberikan saran dan pertimbangan secara berkala atau sewaktu-waktu tentang berbagai aspek di bidang statistik baik diminta maupun tidak kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk periode 2011-2014, Pelaksanaan kegiatan FMS dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 5/M.PPN/01/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2011-2014.

FMS sebagai wadah yang bersifat nonstruktural dan independen diharapkan dapat berperan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh BPS melalui berbagai kegiatan yang direncanakannya. Laporan ini menyampaikan berbagai kegiatan FMS sepanjang tahun 2011, termasuk tantangan yang dihadapi serta usulan pemecahannya.



BAB II

FORUM MASYARAKAT STATISTIK (FMS)

2.1. Kedudukan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, Pasal 29 Ayat 1 dan 2 mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan Pusat Statistik.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat nonstruktural dan independen, yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Implementasi dari kelembagaan Forum Masyarakat Statistik juga dituangkan dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 006/M.PPN/10/2007 Tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik pada 30 Oktober 2007.

2.2. Tugas dan Wewenang

Dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 006/M.PPN/10/2007, Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa FMS bertugas untuk:

1. Memberikan saran dan pertimbangan dalam berbagai aspek di bidang statistik baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala Badan Pusat Statistik yang dapat diberikan secara berkala atau sewaktu-waktu;
2. Memberikan saran mengenai jenis statistik yang perlu dihasilkan untuk mendukung pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat;
3. Memberikan saran tentang penyempurnaan Sistem Statistik Nasional agar semakin andal, efektif, dan efisien;



4. Mengusulkan perbaikan, perluasan dan peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan statistik dan pembinaan statistik;
5. Memberikan evaluasi tentang mutu data yang dihasilkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik serta memberikan saran penyempurnaannya;
6. Memberikan masukan dan evaluasi tentang metodologi statistik, konsep, definisi dan klasifikasi yang digunakan dalam menghasilkan data statistik ekonomi, sosial dan statistik lainnya;
7. Memberikan evaluasi dan masukan-masukan mengenai makna data statistik yang dipublikasikan;
8. Memberikan saran tentang pelayanan statistik dan pemanfaatan statistik secara optimal;
9. Memberikan saran diseminasi data, baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik secara lebih efektif;
10. Menyusun laporan tahunan yang menyangkut segala hal yang telah dilaksanakan.

2.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Secara ringkas struktur organisasi FMS dapat digambarkan sebagai berikut:



Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan FMS periode 2011-2014, telah dibentuk susunan kepengurusan FMS periode 2011-2014 yang masing-masing merangkap anggota, yaitu:

Ketua	: Dr. Sudarno Sumarto
Wakil Ketua I	: Prof. Dr. Sri Moertiningsih Adioetomo
Wakil Ketua II	: Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA
Sekretaris I	: Drs. Wynandin Imawan, M.Sc
Sekretaris II	: Dr. Kecuk Suhariyanto



Anggota FMS periode 2011-2014 berjumlah 22 orang, terdiri dari unsur pemerintah, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat, yang dalam proses pemilihan anggotanya terutama mensyaratkan kompetensi, minat, dan kepedulian dalam memajukan perstatistikan Indonesia.

**Daftar Nama Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS)
Periode 2011-2014**

No.	Nama/Alamat	Alamat/No. Kontak/ No. HP	Email
1.	Prof. Dr. Armida Alisjahbana (Pengarah)	Meneg PPN/Kepala Bappenas Jl. Taman Sirapati No. 2 Telp. 31934811	armida.alisjahbana@fe.unpad. ac.id
2.	Dr. Sudarno Sumarto (Ketua)	SMERU Jl. Cikini Raya 10A HP. 081311201130	ssumarto@smeru.or.id
3.	Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, Ph.D (Wakil Ketua I)	Guru Besar Ekonomi Kependudukan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Telp. 7875107 Fax. 7875107 HP. 0816901964	toening@indo.net.id; smatoening@yahoo.com
4.	Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA (Wakil Ketua II)	Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Jl. Taman Surapati No.2 Telp. 31934259 Fax. 31934259 HP. 08121053812	prasetijo@bappenas.go.id
5.	Drs. Wynandin Imawan, M.Sc (Sekretaris I)	Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI Telp. 3843959 Fax. 3507055 HP. 08128225562	wynandin@bps.go.id
6.	Dr. Kecuk Suhariyanto (Sekretaris II)	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Telp. 3841424 Fax. 3841424 HP. 0818907825	kecuk@bps.go.id
7.	Prof. Dr. Adrianus Mooy	Strategic Asia Gd. Surya Lt. 6 Jl. MH Thamrin Kav. 9 Jakarta 10350 Telp. 3902538 HP. 08551004360	adrymooy@yahoo.com



**Daftar Nama Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS)
Periode 2011-2014**

No.	Nama/Alamat	Alamat/No. Kontak/ No. HP	Email
8.	Kusmadi Saleh, MA	Jl. Telaga Sarangan I/138 Bumi Bekasi Baru Utara, Rawa Lumbu Bekasi. Telp. 8205032 HP. 0816926663	kusmadi@yahoo.com
9.	Prof. Dr. Insukindro	Fakultas Ekonomi UGM Jl. Humaniora No.1 Bulak Sumur Yogyakarta Telp. (0274) 626486 HP. 0811258971	Insukindro@yahoo.com
10.	Prof. Dr. Tommy Firman, MSc, PhD	Planologi ITB Telp. (022) 2509171 Fax (022) 2501263 HP. 0811213995	tfirman@melsa.net.id
11.	Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA	Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas Telp. 31908110 Fax. 31908110 HP. 0816704896	ceppie@bappenas.go.id
12.	Dr. Wijoyo Santoso., SE., MA	Peneliti Utama Senior Bank Indonesia Telp. 317870, Fax. 2311580 HP. 0811399333	wijoyo_s@bi.go.id
13.	Dr. Ir. Edi Effendi Teja, MA	Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, Telp 3101988 HP. 08128671867	edieffendi@bappenas.go.id
14.	Prof. Dr. Mohammad Arsjad Anwar	Perumahan Dosen UI Jl. Daksinapati Timur C18 Rawamangun-Jaktim. Telp. 4892449 HP. 08568546297/ 081574714700	arsjad@centrin.net.id; anwar.arsjad@gmail.com
15.	Prof. Heru Subiyantoro, Ph.D	Kementerian Keuangan Telp dan Fax. 3866120 HP. 0811872983	herusubiyantoro@depkeu.go.id



**Daftar Nama Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS)
Periode 2011-2014**

No.	Nama/Alamat	Alamat/No. Kontak/ No. HP	Email
16.	Prof. Dr. Bustanul Arifin	Jl. Batu Merah No. 45 Jakarta 12510 Telp 7901001 HP.08129401150	barifin@yahoo.com
17.	Dr. Mohamad Ikhsan	HP. 0815871107	ican711@yahoo.com
18.	Drs. Kresnayana Yahya., MSc	Institut Teknologi Surabaya Telp. (031) 5992340 Fax. (031) 5994230 HP. 0811334260	Kresna49@yahoo.com
19.	Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi	Universitas Negeri Makasar, Jln. A. Mangerangi I No.3 Makassar Telp (0411) 869843, 869854 Fax. (0411) 868794 HP. 0811446241	hirka_unhas@yahoo.com
20.	Dr. Ida Bagus Permana	Direktorat Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (Ditjakduk) BKKBN, Telp. 8009029 Ext. 221, Fax. 8000534 HP. 08161644565	idabaguspermana@yahoo.com
21.	Suharsono Sumantri, M.Sc, Ph.D	Peneliti Senior Utama Bidang Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat Telp. 0251-8211163 (H) HP. 08128013628	soem_s@yahoo.com
22.	Dr. Abdul Salam, SE, MM	Presiden Direktur Bank Ganesha Telp 3855345 Extr. 306/307, Fax. 3454880 HP. 08161918221	abdulsalamsaleh@gmail.com



<http://www.bps.go.id>



BAB III PROGRAM KERJA FORUM MASYARAKAT STATISTIK

3.1. Program Kerja Periode 2011-2014

Untuk menjalankan tugasnya, FMS menyusun program kerja periode 2011-2014 yang dititikberatkan pada beberapa kegiatan pokok, yaitu:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data.
 - Metodologi penghitungan indikator statistik
 - *Standard Operating Procedure (SOP)*
 - ✓ Bagaimana data itu dikumpulkan
 - ✓ Bagaimana data itu diolah
2. Meningkatkan *coverage* melalui partisipasi responden (khususnya data perusahaan/*establishment*)
 - Mengundang narasumber seperti Asosiasi dan KADIN
3. Menjadi mediator dalam mengomunikasikan data.
 - Data yang dikomunikasikan harus ditentukan, misalnya inflasi, kemiskinan.
 - Fokus ke satu topik.
 - Tersedia kolom di koran untuk tanya jawab soal data dan interpretasinya
 - FGD dengan media untuk selanjutnya dimuat dalam media
 - Menjadi narasumber dalam kegiatan forum jurnalis
 - Advokasi kepada staf ahli anggota DPR RI
 - *Statistical Brief* serta booklet *Question (Q) & Answer (A)*
4. Melakukan sosialisasi dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan.
 - Untuk data-data yang strategis (angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, IPM)
 - Sasaran : perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah (Bappeda)
5. Memantau perkembangan Program Statcap Cerdas.
 - ✓ Mendengarkan laporan kemajuan
 - ✓ Memberikan masukan dan umpan balik (*feedback*)



- ✓ Perumusan peran FMS dalam StatCap Cerdas
- 6. *Briefing* khusus sebelum *press-release* untuk data statistik strategis seperti kemiskinan dan pengangguran.

3.2. Target dan Sasaran Program Kerja Tahun 2011

Untuk mewujudkan target program kerja periode 2011-2014, FMS melaksanakan program kerja secara bertahap melalui program kerja tahunan yang diarahkan pada beberapa kegiatan berikut:

1. Rapat pleno 2 bulan sekali
2. Melakukan sosialisasi/workshop ke berbagai provinsi. Prioritas: Semarang, Yogyakarta, Makassar, Mataram, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin.
3. Melakukan kunjungan ke lapangan saat BPS melakukan survei/sensus
4. Membuat "*Statistical Brief*" (atau *flier*) 3 edisi (tulisan untuk setiap edisi dikontribusi oleh 3 penulis terkait dengan isu terkini dan strategis)
5. Meningkatkan *coverage* melalui partisipasi responden (mengundang Apindo, Kadin,dll.)

3.3. Administrasi dan Keuangan Tahun 2011

Selain persiapan teknis, kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang FMS perlu didukung oleh administrasi yang baik dan menyeluruh. FMS sepenuhnya didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).

Dalam proses pengajuan rencana kegiatan dan anggaran yang akan digunakan FMS ternyata masih terdapat sejumlah kendala administrasi dan keuangan di antaranya keterbatasan anggaran di BPS maupun Bappenas/Kementerian PPN. Sebagai contoh, beberapa kegiatan sosialisasi dan mediasi yang diprogramkan di beberapa kota terpilih mengalami kesulitan dalam penyelesaian administrasi, komunikasi, dan penyelesaian SPJ karena keberadaan sekretariat FMS hanya terdapat di Jakarta.

Untuk mendukung tugas-tugas dari Anggota FMS dibentuk Sekretariat Pendukung FMS pada 2011 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan



Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.85/SES/HK/10/2011 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2011 dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011. Sekretariat Pendukung FMS bertugas untuk:

1. Menyiapkan ruang rapat;
2. Menyiapkan alat pendukung ruang rapat;
3. Berkoordinasi dengan pihak ketiga dalam menyiapkan jamuan rapat;
4. Berkoordinasi dengan PPK dalam menyiapkan honorarium;
5. Menyiapkan absensi rapat; dan
6. Menyampaikan setiap hasil rapat kepada PPK.

Sekretariat Pendukung FMS terdiri dari enam pegawai yang mewakili BPS dan Kementerian PPN/Bappenas. Secara organisasi, keanggotaan, hak, dan kewajiban mereka ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat pengurus FMS, yaitu:

1. Cut Sawalina, SE, M.Si (Kementerian PPN/Bappenas);
2. Mukijo, SAP (Kementerian PPN/Bappenas);
3. Octal Pramudito, SE (Kementerian PPN/Bappenas);
4. Ibnu Yahya, SE (Kementerian PPN/Bappenas);
5. Indira Widiesa, A.Md (Kementerian PPN/Bappenas);
6. Rustam, SE, MSE (BPS).

Untuk memperlancar komunikasi dan penyiapan administrasi baik melalui surat menyurat, email atau media lain, dalam rapat pengurus FMS telah ditetapkan logo sebagai berikut:



Sekretariat Pendukung Forum Masyarakat Statistik.
Kedeputan Ekonomi Bappenas/Kementerian PPN
Jln. Taman Suropati No. 2.

Gedung Madiun Lantai 5 Jakarta 10310

Telp. Atau Fax. (021) 31934259

Email: fms2011_2014@yahoo.co.id dan Indira.widiesa@bappenas.go.id



3.4. Jadwal Kegiatan FMS Tahun 2011

Sesuai dengan target dan sasaran program kerja tahun 2011, telah disusun jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan berbagai penyelenggaraan statistik di BPS maupun perkembangan isu terkini yang menjadi kebutuhan pengguna data sebagai berikut:

Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1. Rapat pleno	■			■		■		■		■	
2. Kunjungan Ke Lapangan*					■	■	■	■		■	■
3. Meningkatkan coverage					■	■	■	■	■	■	■
4. Membuat "Statistical Brief"						■		■		■	
5. Sosialisasi/Workshop ke Provinsi					■	■	■	■	■	■	
6. Pembahasan mekanisme organisasi				■							

*** Jadwal Beberapa Survei BPS:**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

: Bulan 3, 6, 9, 12

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

: Bulan 2, 5, 8, 11

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)/ Kemiskinan Mikro

: Bulan 7

Sensus Sapi

: Bulan 6

Catatan:

- ✓ Rapat pleno disepakati dilaksanakan setiap hari Selasa dengan periode sekali pertemuan dalam 2 bulan.
- ✓ Kunjungan ke lapangan akan diintegrasikan dengan jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan survey yang diselenggarakan oleh BPS



BAB IV PERMASALAHAN STATISTIK DAN REKOMENDASI FORUM MASYARAKAT STATISTIK TAHUN 2011

4.1. PROGRAM KERJA FMS PERIODE 2011-2014

Persiapan Program Kerja FMS 2011-2014 diawali dengan merumuskan target dan sasaran jangka panjang yang harus dicapai selama periode 2011-2014. Pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap melalui program kerja tahunan yang antartahun memiliki keterkaitan dan kesinambungan dalam mewujudkan target dan sasaran jangka panjang (*the ultimate goals*). Rumusan program kerja FMS jangka panjang dibahas dan disempurnakan kembali dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota FMS dan menyepakati hal-hal berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data

1. Memberikan masukan tentang penyempurnaan metodologi.
2. Pemutakhiran metodologi statistik terkait dengan jumlah sampel, cakupan data, frekuensi survei, maupun kualitas data → perlu dilakukan audit-perhitungan Sakernas, garis kemiskinan, dsb.
3. Penyempurnaan indikator statistik dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pengguna → Contoh: diperlukan indikator lokal tentang kemiskinan dan MDG yang lebih tepat diterapkan di Indonesia.
4. Memberi masukan tentang prosedur lapangan untuk survei BPS.
5. Perlu evaluasi tentang SOP atau protap tentang bagaimana data dikumpulkan, data diolah, dsb.
6. Memberi masukan tentang jenis data statistik yang perlu dan urgen untuk dikembangkan, sesuai fenomena sosial-ekonomi yang berkembang, kepekaan masyarakat dan kebutuhan riil pemerintah (dengan mengundang nara sumber/users)



2. Meningkatkan cakupan (*coverage*) melalui partisipasi responden (*khususnya data perusahaan/establishment*)

1. Memberi masukan tentang kiat memotivasi responden untuk setiap pendataan/survei BPS, khususnya data perusahaan/establishment.
2. Mengundang Ketua Asosiasi dan Kadin supaya partisipasi perusahaan dalam survei/sensus meningkat

Catatan:

BPS telah memiliki MoU dengan KADIN untuk mendapatkan data perusahaan, namun *respon rate* belum seperti yang diharapkan.

3. Mediator dalam mengomunikasikan data

1. Membantu meluruskan sekaligus memberi pencerahan terhadap pandangan dan persepsi masyarakat yang sangat beragam tingkat pengetahuannya terhadap data statistik yang dihasilkan BPS (tentu bukan dalam koridor corong BPS).
2. Memberikan edukasi yang tepat kepada para pemangku kepentingan untuk dapat memaknai dan menginterpretasikan data dengan benar:
3. Menulis kolom di koran untuk tanya jawab soal data
4. Melakukan FGD dengan media untuk selanjutnya dimuat dalam media
5. Menjadi narasumber dalam kegiatan forum jurnalis
6. Advokasi kepada staf ahli anggota DPR RI

4. Melakukan sosialisasi dalam forum-forum musyawarah pembangunan

1. Memberi masukan tentang cara sosialisasi dan diseminasi agar pemanfaatan data statistik oleh masyarakat menjadi lebih efektif dan ekstensif.
2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman data untuk mengurangi kesalahpahaman interpretasi data terutama untuk data-data yang strategis (angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, IPM)



3. Sasaran : kelompok media, masyarakat, akademisi, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah (Bappeda)
4. FMS perlu diberikan sesi di rakornas, musrenbang, forum rapat Bappenas
5. Menyusun bahan-bahan sosialisasi:
6. Membuat "*Booklet Q & A*" yang berisi arti dari istilah-istilah statistik dasar, arti sederhana dari *basic indicator*.
7. Membuat "*Statistical Brief*" (setiap edisi berisi sekitar 3 tulisan)

5. Monitoring perkembangan Program Statcap Cerdas

1. Mendengarkan laporan kemajuan
2. Memberikan masukan dan umpan balik
3. Perumusan peran FMS dalam StatCap Cerdas

STATCAP-CERDAS: *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics*

Program modernisasi dan reformasi BPS dimaksudkan untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi BPS dalam memproduksi dan menyediakan data yang andal dan tepat waktu (sesuai dengan standard internasional dan sudah diterapkan kantor statistik negara lain), serta cepat tanggap terhadap kebutuhan pengguna data.

6. Briefing khusus sebelum *press-release* untuk data statistik strategis (inflasi, kemiskinan dan pengangguran)

1. BPS perlu menyampaikan signal/arah dua hari sebelum *press-release* ke FMS (tidak perlu angka, hanya signal/arah secara singkat) sesuai tugas dan fungsi BPS dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan di Indonesia.



Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof. Dr. Armida Alisjahbana sebagai Pengarah dalam Kepengurusan FMS memberikan beberapa pengarahannya terkait dengan dibentuknya Forum Masyarakat Statistik (FMS) untuk periode 2011-2014 sebagai berikut:

1. Tujuan Forum Masyarakat Statistik (FMS) adalah meningkatkan kualitas perstatistikan di Indonesia. Forum ini merupakan forum berkelanjutan dari periode sebelumnya yang berakhir pada 2009 dan dilanjutkan pada 2011 hingga 2014.
2. Setelah pertemuan ini, diharapkan segera terbit Peraturan Menteri yang menjadi dasar terbentuknya Forum Masyarakat Statistik (FMS).
3. Yang menjadi Sekretaris dalam FMS diharapkan adalah wakil dari BPS.
4. BPS adalah lembaga independen, tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. Kredibilitas BPS harus tetap terjaga.
5. Seiring dengan waktu, dibutuhkan pemutakhiran data, antara lain tentang :
 - ✓ Jenis data. Yang dimaksud jenis data adalah penambahan jenis data baru, penggabungan atau pun pemecahan data yang sudah ada selama ini.
 - ✓ Metodologi. Pemutakhiran metodologi dalam mengolah data terkait dengan cakupan data maupun kualitas data tersebut. Contoh: Sakernas, harus ditambah cakupan datanya, frekuensi survei, maupun kualitas.
6. Pemutakhiran data tersebut pada akhirnya terkait dengan dana yang akan dialokasikan pada BPS.
7. Perlu dipikirkan mekanisme umpan balik atas masukan dan kritik yang diterima BPS terkait data yang diterbitkan. Hal ini karena tidak semua masukan dan kritik itu dapat diterima.
8. Data semakin penting dari waktu ke waktu. Terutama bagi pengguna data tersebut dalam mengambil keputusan seperti pemerintah, akademisi maupun swasta seperti perbankan. Oleh karena itu, data harus semakin baik. Terkait dengan penggunaan data, penginterpretasian data oleh para pemangku kepentingan juga harus semakin ditingkatkan, terutama oleh media. Memaknai dan menginterpretasikan data dengan benar dibutuhkan edukasi yang tepat kepada para pemangku kepentingan.
9. Data yang disediakan harus kredibel, tepat waktu, dan harus dapat diakses dengan mudah (terkait dengan diseminasi data).



Sejak 2010 BPS secara bertahap telah melakukan perencanaan program STATCAP CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of StAtisticS*) dan akan diimplementasikan pada 2011-2015. Program tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari program reformasi birokrasi di BPS. Pada saat pembahasan program kerja FMS 2011-2014, muncul beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian BPS terutama terkait dengan penyediaan data statistik berkualitas, antara lain:

1. Memperbaiki akses publik terhadap data (mentah) yang dikumpulkan BPS.
2. Pengumpulan dan penyediaan data pendapatan/*income* dalam survei RT (Susenas, Sakernas) untuk melengkapi data pengeluaran/*expenditure*.
3. Melengkapi data Sakernas dengan informasi mengenai status kepegawaian (pegawai tetap, kontrak, *outsourcing*, harian, dll) dan informasi mengenai tempat kerja (ukuran perusahaan, formal/informal, sektor usaha, status badan hukum PT, CV, perorangan, yayasan, pemerintah, dll).
4. Peningkatan kualitas data ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) → metode, sumber data, dsb
5. Tinjauan ulang terhadap pengumpulan data untuk perhitungan PDB berkaitan dengan munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang kemungkinan tidak akan terungkap dengan metode yang digunakan sekarang → industri kreatif dan kegiatan ekonomi berbasis internet.
6. Pembahasan Laju Pertumbuhan Penduduk Hasil SP2010 → cakupan lebih baik karena sosialisasi ke masyarakat juga efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam SP2010. Apakah perlu mengemukakan hasil PES (Post Enumeration Survey) yang menemukan sebanyak 9 juta penduduk belum tercover dalam SP2010 bulan Mei/Juni 2010?
7. Keterkaitan antara PDB, kemiskinan, dan pengangguran → *pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, pro kaum miskin, pro lingkungan?*
8. Usulan tentang data yang perlu dicakup dalam Sensus Pertanian 2013
9. Evaluasi tentang gap yang besar antara indikator makro dan indikator mikro



4.2. KEMISKINAN

Pemaparan tentang Metode Pengukuran Kemiskinan di Indonesia: Relevansi dan Keterbandingan telah disampaikan oleh Dr. Hamonangan Ritonga, M.Sc (Direktur Statistik Ketahanan Sosial di BPS) dalam salah satu rapat pleno FMS pada 27 September 2011. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Secara ringkas telah disampaikan beberapa hal terkait dengan metode pengukuran kemiskinan di Indonesia menurut metode BPS (naskah *powerpoint* terlampir).

PEMBAHASAN/DISKUSI DAN REKOMENDASI

1. Keterbandingan angka kemiskinan antar beberapa kementerian/lembaga/unit penelitian perlu disinkronisasi dan diharmonisasi.

- ❖ Perlu *academic paper* untuk menjawab dan meluruskan perhitungan Bank Dunia terutama menyangkut masalah metodologi (*academic based* bukan *politics based*).
- ❖ *Forum akademisi (Academic forum)* diperlukan untuk sosialisasi metodologi yang masuk akal dan strategis.
- ❖ Pertanyaan Bank Dunia (yang tidak pernah menghitung kemiskinan) perlu dijawab.
- ❖ Rapat pengurus mengenai metode kemiskinan untuk presentasi konsultan Bank Dunia.

2. Penyempurnaan dan Sosialisasi Pengukuran Kemiskinan Metode BPS.

- ❖ Konsep kemiskinan perlu diperbaharui
- ❖ Perlu penjelasan 52 komoditas (GK makanan) terdiri dari apa saja. (untuk mengecek inflasi). Apakah ke-52 komoditas tersebut sudah mampu mengukur indikator kemiskinan akan kebutuhan dasar makanan?
- ❖ Kemiskinan sektor beras, secara politik sebaiknya dipublikasikan mulai 2014 dan landasan perhitungannya dilakukan mulai dari sekarang.
- ❖ Komoditas nonmakanan esensial (*non-food essential*) perlu dikaji lebih lanjut agar relevan (perlu mendapat masukan konstruksi sosial) dan menjadi topik kunjungan daerah
- ❖ Kemiskinan per sektor dirancang untuk mendukung atau pro-lingkungan.
- ❖ Kunjungan lapangan lebih diarahkan pada sosialisasi.



- ❖ Menelan 1 angka saja akan menjadi salah, harus ada beberapa angka bersama metode penghitungannya.
- ❖ Kemiskinan naik → nilai *absolute* naik, bila ada perubahan metode. *Policy trigger* mengurangi kemiskinan dan didasarkan pada trend data kemiskinan.
- ❖ Perhitungan kemiskinan dengan metode spesifik (*policy purpose*), contoh: pengeluaran untuk energi (*energy expenditure*), *berbasis asset (aset based)*, *berbasis kalori (calorie based)*, kebijakan spesifik sektoral.
- ❖ Pengeluaran untuk energi dipakai kerangka sampling untuk kemiskinan
- ❖ Profil orang miskin sudah ada sangat lengkap.
- ❖ Di buku kemiskinan terdapat profil jenis makanan dan nonmakanan.
- ❖ Boskin merubah metode inflasi, bisakah FMS melakukan perubahan metode garis kemiskinan, serta alternatifnya?Sebaiknya 5 tahun sekali melakukan perhitungan bobot (*weighted*) kemiskinan (jangan 10 tahun sekali) contoh I-O yang 5 tahun sangat baik.
- ❖ Rencana perubahan metode kemiskinan diaplikasikan pada saat pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke-II.
- ❖ Perlukah mengadakan forum penentuan metode baru penghitungan kemiskinan, lalu dijelaskan kepada Wakil Presiden?
- ❖ Perubahan rezim merepotkan pengelolaan data statistik.
- ❖ Langkah selanjutnya adalah mengundang kaum cendekiawan eksternal membahas *methodology proposed*, atau metode yang konsisten.
- ❖ Lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif perlu diberi pemahaman metodologi yang berimbang.
- ❖ Kesenjangan, yang menjadi perhatian publik seperti kenaikan gini ratio.
- ❖ Masalah metodologis (gini ratio) perlu diperhatikan.

3. Keterkaitan Ukuran Kemiskinan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Indikator Sosial dan Ekonomi Lain

- ❖ Indeks pertanaman perlu yang diperbaiki pertama kali agar produksi beras menjadi benar perhitungannya.
- ❖ Perhitungan luas tanam menjadi luas panen itu tidak rasional.
- ❖ Metode mark up data konsumsi (GDP) dan kemiskinan perlu direvisi secara intensif.
- ❖ Tidak semua pertumbuhan dapat mendorong *trickle down effect*.



- ❖ Komposisi pertumbuhan dan kemiskinan, provinsi rural-urban, perbedaan elastisitas tiap sektor ekonomi.
- ❖ Untuk mengurangi kemiskinan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi, sektor yang penting (sektor jasa urban rural) perlu dikaji lebih lanjut.
- ❖ Tembakau berkontribusi besar pada data kemiskinan, pemerintah perlu kebijakan yang tegas.
- ❖ Penanggulangan kemiskinan yang lebih mekanis (*Mechanical poverty reduction*).
- ❖ Tren kemiskinan merupakan satu hal penting secara makro, namun *absolute poverty* penting untuk dibiayai APBN.
- ❖ Tidak mengubah sasaran makro, kecuali yang mikro.
- ❖ Keluar dari dan masuk dalam kemiskinan antarkelompok miskin perlu disosialisasikan.
- ❖ Data dirinci menurut persentase jumlah anak, wanita usia subur agar intervensi mencapai pada *core problem* (contoh: wajib belajar di Surabaya sangat rendah)
- ❖ Pada 2013 tersedia sensus pertanian. Kerangka kerja dari sekarang (harus) diperbaiki. Dengan konsep baru, realitas pertanian akan lebih terdata.
- ❖ Perdagangan beras sangat rentan, terjadi perubahan pola, bulog terlalu kecil sehingga intervensi lemah. Di Jatim, pengusaha beras sangat berpengaruh. Terdapat alat konversi tepung beras menjadi beras kembali sehingga sangat besar keuntungannya. Pembiayaan sektor beras luar biasa besarnya sayangnya atas nama selain beras. Sensus saat ini menggunakan asumsi karena realitas mata rantai perputaran beras tidak diketahui.
- ❖ Karakteristik antarkelompok kemiskinan penting dan perlu diklasifikasi menurut kelayakan penerimanya
- ❖ Karakteristik pertumbuhan daerah menjadi kenyataan paradox, dimana kemiskinan tinggi di tengah pengembangan sektor non riil.
- ❖ Kecenderungan transfer antarkelompok kemiskinan perlu dikaji sumber penyebab apakah karena penyakit atau tidak.
- ❖ Mengacu pada RPJMN



4.3. KETENAGAKERJAAN (PENGANGGURAN)

Pemaparan tentang Statistik Ketenagakerjaan di Indonesia: Kondisi Pengangguran telah disampaikan oleh Ir. S. Aden Gultom, MM (Kepala Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan di BPS) dalam salah satu rapat pleno FMS pada 29 November 2011. Indikator ketenagakerjaan yang merupakan produk BPS selama ini telah mengikuti metode penghitungan secara Internasional, yaitu pendekatan konsep standar *International Labour Organisation* (ILO) atau *ILO Concept Approach*. Secara ringkas telah disampaikan beberapa hal terkait dengan Statistik Ketenagakerjaan di Indonesia yang telah disajikan dan didiseminasikan oleh BPS selama ini (naskah *powerpoint* terlampir).

PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

1. Keterbandingan angka pengangguran antarwaktu (*time series data*) dengan adanya beberapa revisi proyeksi penduduk (*update SP 2010 kondisi Mei 2010*).

- ❖ Perlu dikaji terus menerus mengenai konsistensi data yang dihasilkan oleh BPS.
- ❖ Perlu *link and match* antara *subject matter* sebagai producer data dengan diseminasi data yang akan diluncurkan dalam website BPS atau bentuk informasi lain.
- ❖ Belum pernah terjadi penurunan jumlah yg bekerja antara Februari-Agustus 2010 dari 42,83 % menjadi 41,49%. Indikasi sementara akibat berkurangnya pekerja keluarga.
- ❖ Perlu ada kajian *series data* sebelum melakukan rilis data yg terbaru.
- ❖ *Backcasting* hingga tahun 2000 atau paling tidak hingga tahun 2004.
- ❖ Perlu didalami data ketenagakerjaan kita. Apakah pengangguran turun karena pekerja pergi ke luar negeri?
- ❖ Perlu ada kajian khusus oleh BPS tentang data ketenagakerjaan yang lintas sektoral (*link and match* dengan semua *subject matter*).
- ❖ Perlu konsistensi penerapan konsep dan definisi yang sama untuk membandingkan *series data*.
- ❖ Penurunan tenaga kerja lebih lambat dibandingkan penurunan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Bagaimana kontribusi BPS dalam menjelaskan hal ini sebagai tranformasi struktural di sektor pertanian?



2. Keterkaitan Indikator Ketenagakerjaan (Angka Pengangguran) dengan Indikator Sosial dan Ekonomi Lain

- ❖ Perlu integrasi antarsubject matter, terutama kepada BPS.
- ❖ PDB per pekerja naik kurang dari 3% dan secara implisit produktivitasnya dinilai tidak meyakinkan dan terlalu rendah. Mestinya bisa mencapai 4% ke atas.
- ❖ Perkembangan deflator PDB cenderung meragukan.
- ❖ Pertumbuhan dunia tidak mempengaruhi perekonomian nasional?
- ❖ Deflator utk ekspor terlalu rendah.
- ❖ ISIC 36 utk komoditas semen, dll seharusnya berkaitan erat dengan pembangunan fisik/bangunan.
- ❖ Laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan deflator PDB masih belum sinkron dan konsisten
- ❖ Dana bagi hasil dari migas dan nonmigas dan sisanya hanya dikelompokkan sebagai lainnya saja?
- ❖ Belanja pemerintah harusnya bisa dikaji lebih mendalam menurut komponennya. Bagaimana perubahannya, kaitannya dengan penyiapan dana APBN-nya? Apakah dapat diserap dan apa indikasi yg menjelaskan pengeluaran pemerintah tersebut?
- ❖ Indonesia termasuk pengekspor tenaga kerja. Ada kemungkinan *linkage* dengan data ketenagakerjaan, misalnya bisa berdampak mengurangi penganggur karna pergi ke luar negeri.
- ❖ Pertumbuhan ekonomi belum berdampak luas → meskipun tingkat pengangguran dan kemiskinan turun → jumlahnya masih cukup tinggi.
- ❖ Pertumbuhan ekonomi karena migas di suatu daerah sebenarnya tidak dinikmati oleh penduduk setempat.
- ❖ Pendekatan garis kemiskinan sebagai standar lebih relevan diterapkan di daerah miskin.
- ❖ Info dari Managing Director World Bank: data-data Indonesia diakui cukup baik.
- ❖ Belanja barang pemerintah dalam nilai nominal seakan-akan mencerminkan ada *sustainable development*. Padahal perlu dilihat aspek lain, misalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (misalnya: SDM, dll).
- ❖ Bagaimana cara BPS menghitung PDRB provinsi dan kabupaten/kota.



- ❖ Telah diupayakan sistem statistik yang terintegrasi sebagai bagian dari Statcap CERDAS yg sedang berjalan.
- ❖ Penghitungan PDRB Kab/Kota menggunakan data survei pendukung yang juga dilakukan untuk rekonsiliasi dengan PDRB Provinsi. Konsekuensinya adalah selalu ada diskrepansi statistik dalam penghitungannya
- ❖ Ada beberapa sumber daya yang sangat berpengaruh di suatu daerah sehingga bisa timbul fluktuasi kondisi perekonomian di daerah tersebut
- ❖ Penghitungan inflasi akan diperluas menjadi 78 kota (sekarang masih mencakup 66 kota).
- ❖ Potret kemiskinan di sektor pertanian
- ❖ Penghitungan elastisitas per sektor sebagai *baseline* penentuan program pengentasan kemiskinan per sektor.
- ❖ Penyerapan tenaga kerja untuk setiap pertumbuhan 1% PDB setara dengan 450.000 pekerja sudah dijadikan sebagai acuan dalam Undang-undang RAPBN.
- ❖ Bagaimana proses *the whole process development* di sektor pertanian masih perlu dikaji dan dicarikan penjelasannya.
- ❖ Penghitungan inflasi di kab/kota pemekaran perlu diperdalam agar indikator ini bisa dioptimalkan bagi daerah tersebut.
- ❖ Pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), penciptaan kesempatan kerja (*pro-job*), dan penanggulangan kemiskinan (*pro-poor*) belum efektif.
- ❖ Pelaksanaan panel survei harus menerapkan *clustering* agar tidak terjadi salah arah (*misleading*).
- ❖ Program pengentasan kemiskinan akan lebih diarahkan kepada pendekatan infrastruktur, tidak lagi pada rumah tangga miskin.



4.4. KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN (PENGELUARAN)

Pemaparan tentang Analisis Ketimpangan Pendapatan di Indonesia: Sektorial dan Spasial telah disampaikan oleh Margo Yuwono, S.Si, M.Si (Kepala Subdirektorat Analisis Statistik di BPS) dalam salah satu rapat pleno FMS pada 29 November 2011. Indikator ketimpangan distribusi pendapatan yang merupakan produk BPS selama ini telah mengikuti metode penghitungan secara Internasional, yaitu Gini Ratio, Ukuran Bank Dunia (40% penduduk lapisan terbawah), Indeks Theil, Indeks-L, Rasio Q5/Q1 (*Quantile*), dan ukuran lain sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Secara ringkas telah disampaikan beberapa hal terkait dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Pengeluaran) di Indonesia yang telah disajikan dan didiseminasikan oleh BPS selama ini (naskah *powerpoint* terlampir).

PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

1. Keterbandingan beberapa indikator ketimpangan pendapatan (distribusi pendapatan/pengeluaran) antarwaktu (*time series data*).

- ❖ Perlu penghitungan gini rasio dan indikator ketimpangan dengan penimbang dari hasil SP 2010. Seberapa besar pergeseran angkanya.
- ❖ Informasi data ketimpangan perlu dikaji lagi dengan penimbang yang baru hasil SP 2010 dan dilakukan *backcasting*. BPS harus mampu menjelaskan ketimpangan ini lebih mendalam.
- ❖ Masalah ketimpangan (*inequity*) sangat penting sebagai salah satu fokus kajian yg akan dimuat dalam laporan tahunan FMS. Perlu diskusi lanjutan dengan Menteri Bappenas

2. Keterkaitan Ukuran Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pendapatan) dengan

Indikator Sosial dan Ekonomi Lain

- ❖ Penghitungan indikator gini rasio yang dihitung hanya berdasarkan data Susenas belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini karena Susenas hanya memuat sekitar 40% dari pengeluaran konsumsi dalam PDB.
- ❖ Garis kemiskinan dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi per kapita menghasilkan rasio yg terus menurun.
- ❖ Gini rasio lebih relevan diterapkan di daerah menengah ke atas
- ❖ Bagaimana menjelaskan relevansi penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dan masih rendahnya ketimpangan



BAB V

PENUTUP

5.1. CAPAIAN KEGIATAN FMS 2011

Meski berbagai upaya maksimal telah dilakukan untuk mencapai target dan sasaran kegiatan FMS Tahun 2011, realisasi capaian belum memenuhi target yang diharapkan. Beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan FMS selama 2011 antara lain:

1. Rapat pengurus FMS
 - ✓ Penyiapan rencana kerja FMS Tahun 2011-2014
 - ✓ Penyiapan rencana kerja FMS Tahun 2011
2. Rapat Pleno Anggota FMS
 - ✓ Rapat pleno I : Kamis, 10 Februari 2011
 - Perkenalan anggota FMS
 - Arahan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan peran dan output yang diharapkan dari kegiatan FMS
 - Diskusi Anggota FMS terkait isu-isu strategis sebagai bahan masukan penyusunan program kerja FMS Tahun 2011-2014
 - Pembentukan kesekretariatan untuk mendukung kegiatan FMS.
 - ✓ Rapat pleno II : Selasa, 10 Mei 2011
 - Penyampaian Program Kerja FMS Tahun 2011-2014 oleh Ketua FMS.
 - Penyampaian Program Kerja FMS Tahun 2011 oleh Ketua FMS.
 - Diskusi beberapa isu strategis yang akan menjadi fokus perhatian kegiatan FMS selama 2011.
 - ✓ Rapat pleno III : Selasa, 27 September 2011
 - Evaluasi terhadap target sosialisasi dan kunjungan lapangan yang harus dilakukan anggota FMS.
 - Presentasi tentang kemiskinan di Indonesia oleh BPS untuk mensosialisasikan hasil-hasil penghitungan angka kemiskinan yang telah dirilis secara resmi.
 - ✓ Rapat pleno IV : Selasa, 29 November 2011



- Evaluasi terhadap realisasi kegiatan FMS yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan pada 2011 baik secara administrasi maupun bidang teknis.
- Presentasi tentang indikator ketenagakerjaan oleh BPS, secara khusus untuk mensosialisasikan hasil-hasil penghitungan angka pengangguran yang telah dirilis secara resmi.
- Presentasi tentang indikator ketimpangan distribusi pendapatan oleh BPS, secara khusus untuk mensosialisasikan hasil-hasil penghitungan Gini Rasio, Kriteria Bank Dunia, Rasio Q5/Q1, dan indikator ketimpangan lainnya yang telah dirilis secara resmi.

Secara ringkas capaian kegiatan FMS tahun 2011 dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu bidang administrasi dan bidang teknis sebagai berikut:

1. Bidang Administrasi

- Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: KEP. 5/M.PPN/01/2011 Tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2011-2014.
- Keputusan Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas Nomor: KEP. 85/SES/HK/10/2011 Tentang Pembentukan Sekretariat Pendukung Kegiatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Tahun 2011-2014
- Rapat Pengurus dilakukan 2 kali pertemuan.
- Rapat pleno anggota FMS (untuk membahas isu terkini) dilakukan 4 kali pertemuan dari minimal target 6 kali pertemuan.
- Penetapan logo FMS.

2. Bidang Teknis/Narasumber

- Pembahasan dan diskusi beberapa topik/isu strategis:
 - ✓ Kemiskinan,
 - ✓ Ketenagakerjaan,
 - ✓ Ketimpangan Distribusi Pendapatan.
- Saran dan Rekomendasi terkait beberapa topik/isu strategis.
- Draft layout buletin "*Statistical Brief*" akan memuat tiga artikel (tulisan Prof. Dr. Sri Moertiningsih Adioetomo, Dr. Sudarno Sumarto, dan Dr. Wijoyo Santoso, SE, MA).
- Draft Laporan Tahunan 2011 sebagai kompilasi semua kegiatan FMS selama setahun.



5.2. KENDALA/HAMBATAN YANG DIHADAPI

Capaian dan realisasi kegiatan FMS yang belum sesuai dengan Program Kerja Tahun 2011 diakibatkan oleh adanya kendala/hambatan yang dihadapi selama tahun 2011 antara lain:

1. Kendala Administrasi

- ✓ Sekretariat Pendukung Kegiatan Anggota FMS Tahun 2011 belum mampu optimal menjalankan tugasnya karena keterlambatan administrasi penyiapan SK sebagai landasan hukum.
- ✓ Koordinasi dengan PPK terkait dengan penyiapan anggaran setiap kegiatan yang dibebankan dalam APBN Kementerian PPN/Bappenas masih belum sepenuhnya dapat diakomodir.
- ✓ Koordinasi dan penyiapan kebutuhan administrasi keuangan dan akomodasi yang dibutuhkan untuk mendatangkan anggota FMS yang berdomisili di luar kota Jakarta (Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Makassar).
- ✓ Pendanaan kegiatan FMS yang belum teradministrasikan secara baik mengakibatkan kegiatan sosialisasi ke beberapa provinsi dan kunjungan lapangan tidak dapat dilaksanakan.
 - ✓ Penyiapan *Statistical Brief* atau *Policy Brief* yang seyogianya akan diterbitkan terkendala karena penyiapan administrasi buletin untuk menerbitkan series publikasi berupa nomor ISSN belum ada. Akan tetapi beberapa materi yang akan dimuat terkait dengan judul artikel "Upaya Memanfaatkan Terbukanya Jendela Peluang Bagi Angkatan Kerja Muda" yang ditulis oleh Sri Moertiningsih Adioetomo sudah diserahkan ke Sekretariat.

2. Kendala Teknis

- ✓ Berbagai kesibukan anggota FMS sering kali berdampak terhadap ketidakhadiran yang bersangkutan dalam berbagai kegiatan rapat pengurus atau rapat pleno/forum diskusi antar anggota FMS.
- ✓ Belum terselenggaranya suatu workshop/sosialisasi untuk menindaklanjuti berbagai hasil pembahasan/rekomendasi yang telah dikaji sebelumnya.



5.3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.3.1. Rekomendasi untuk Manajemen FMS

1. Di tahun 2011, topik yang dibahas dalam rapat pleno masih terbatas pada pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi → perlu dipertimbangkan untuk memperluas ke topik lain misalnya pertanian (menyongsong Sensus Pertanian 2013), kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia, dll.
2. Kunjungan ke provinsi dan sosialisasi ke daerah perlu direncanakan seawal mungkin, disesuaikan dengan pelaksanaan survei BPS dan jadwal waktu masing-masing anggota. Perlu dirancang topik-topik sosialisasi. Seragam antar provinsi atau berbeda-beda?

5.3.2. Rekomendasi untuk Badan Pusat Statistik

A: Statistik Kemiskinan

1. Diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi keterbandingan angka kemiskinan antar berbagai kementerian/lembaga/unit penelitian
2. Perlu penyempurnaan dan sosialisasi metode pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS
3. Pengumpulan data SUSENAS yang dilakukan per-kuartal perlu dikaji ulang dan dianalisis secara seksama manfaat dan biayanya

B: Statistik Ketenagakerjaan dan PDB

1. Perlu keterbandingan statistik ketenagakerjaan antar waktu karena adanya perbedaan angka penimbang
2. Perlu ada keterkaitan antara indikator ketenagakerjaan, khususnya angka pengangguran, dengan indikator sosial dan ekonomi lainnya.
3. Perlu dilakukan sinkronisasi dan konsistensi antara laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi; dan deflator PDB

C: Statistik Ketimpangan (*inequality*)

1. Penghitungan angka ketimpangan (Gini ratio) perlu disesuaikan dengan angka penimbang yang baru hasil SP2010 serta dilakukan backcasting
2. Penghitungan angka ketimpangan yang hanya didasarkan pada data SUSENAS perlu dikaji ulang karena tidak representatif.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: PER. 006/M.PPN/10/2007 Tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik

Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas
Nomor: KEP. 5/M.PPN/01/2011 Tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2011-2014

Keputusan Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas
Nomor: KEP. 85/SES/HK/10/2011 Tentang Pembentukan Sekretariat Pendukung Kegiatan Forum Masyarakat Statistik Tahun 2011-2014

Bahan presentasi tentang "Metode Pengukuran Kemiskinan di Indonesia: Relevansi dan Keterbandingan"

Bahan presentasi tentang "Statistik Ketenagakerjaan"

Bahan presentasi tentang "Analisis Ketimpangan Pendapatan: Sektoral dan Spasial"



<http://www.bps.go.id>

